

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu bidang kajian utama dalam Ilmu Hubungan Internasional adalah isu keamanan. Keamanan (*security*) sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah keadaan yang terbebas dari segala bentuk marabahaya, ancaman, kecemasan, dan ketakutan (Sagena, 2019). Kondisi aman ini tentunya tidak hanya diinginkan oleh negara bangsa, namun juga individu maupun kelompok. Secara terminologi konsep keamanan dibagi menjadi dua, yaitu keamanan yang dilihat dari pendekatan tradisional dan keamanan dari sudut pandang non-tradisional (Buzan, 1991)

Pendekatan tradisional terhadap keamanan menitikberatkan pada negara sebagai aktor utama dan penggunaan kekuatan militer. Pendekatan ini dipengaruhi oleh teori realisme, yang mengartikan keamanan sebagai ketiadaan ancaman militer atau upaya perlindungan negara dari penggulingan atau invasi eksternal. Oleh karena itu, dalam pendekatan konvensional, keamanan didefinisikan sebagai ketiadaan ancaman militer atau kemampuan suatu negara untuk melindungi dirinya dari serangan militer eksternal (Buzan, 1991).

Dalam perspektif konvensional ini, keamanan didefinisikan sebagai keamanan suatu negara yang terancam oleh militer negara lain sehingga harus dilindungi oleh militer negara tersebut (Mutimer, 1999). Negara adalah subjek sekaligus target keamanan, dan merupakan pusat dari upaya untuk memastikan keamanan negara. Dengan demikian, strategi keamanan konvensional terkait erat dengan kedaulatan negara dan integritas teritorial, seperti yang diuraikan dalam Pasal 2 (4) Piagam PBB. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: “*All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state.*” (Amaritasari, 2015)

Paradigma keamanan klasik ini berkembang melalui Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Dingin. Selama Perang Dingin, dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet, memiliki persepsi yang sama tentang satu sama lain. Kaum realis berpendapat bahwa sistem internasional bersifat anarkis, tanpa otoritas yang lebih tinggi dari negara untuk mengatur atau mencegah negara berperang. Akibatnya, untuk mencapai tujuan mereka, negara terlibat dalam konflik dan mempertahankan

keseimbangan kekuatan dengan negara lain atau kita kenal sebagai istilah *balance of power*. Ketika suatu negara memperkuat militernya, negara lain akan memandang dan mempercayainya sebagai sebuah ancaman, hal ini dikenal sebagai *security dilemma*. Menurut Buzan, *security dilemma* akan terus berlanjut karena setiap negara akan terus menginginkan kekuasaan (Praditya, 2016).

Dengan berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet, Amerika Serikat muncul sebagai satu-satunya negara adidaya yang dipandang mampu membawa perubahan signifikan dalam konstelasi hubungan internasional, terutama di Timur Tengah. Amerika Serikat tampil sebagai negara adidaya baru di dunia, menjadi yang pertama memiliki senjata nuklir dan sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Amerika Serikat dikategorikan sebagai negara maju pasca-industri dan memiliki ekonomi paling canggih di dunia, dengan perkiraan PDB sebesar \$26,24 triliun pada tahun 2023 (Statista, 2023). Mempromosikan demokrasi di Timur Tengah dijadikan oleh Amerika Serikat sebagai kebijakan luar negeri utama pasca-Perang Dingin. Para ahli strategi Amerika memutuskan bahwa Amerika harus mencegah kekuatan musuh mendominasi wilayah yang mempunyai kepentingan geopolitik atau geo-ekonomi yang penting (Brands, 2019). Akibatnya, Amerika Serikat telah melakukan intervensi di berbagai negara dan konflik, terutama sejak peristiwa 9/11 dan deklarasi Perang Melawan Teror (*War on Terror*). Namun, tindakannya sering kali membantu imperialisme daripada negara yang diklaim diuntungkan oleh intervensinya (Wood, 2019).

Kawasan Timur Tengah merupakan salah satu kepentingan nasional Amerika Serikat, karena pemerintah yang didorong oleh liberalisme ingin membujuk negara-negara lain untuk meliberalisasi di bidang politik, pendidikan, ekonomi, dan agama. Sebagian besar negara-negara Arab di Timur Tengah masih berkembang, dengan sistem politik dan ekonomi yang tidak stabil, meskipun memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Akibatnya, kawasan Timur Tengah yang stabil merupakan kepentingan nasional Amerika Serikat, yang memungkinkannya untuk melaksanakan program reformasinya (Solichien, 2008). Asumsi yang paling bertahan lama mengenai kebijakan luar negeri AS adalah gagasan bahwa Amerika karena keserakahan, dorongan ideologi mesianis, atau anggapan kekaisaran yang sederhana ingin mendominasi Timur Tengah.

Pada kenyataannya, kebijakan Amerika telah lama terkoyak oleh dua hal yang saling bertentangan: kebutuhan untuk melindungi kepentingan abadi Amerika, dan keinginan untuk menghindari permasalahan yang tidak berkesudahan di kawasan ini (Brands, 2019). Kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah saat ini dapat dibagi ke dalam lima kategori: menjaga aliran bebas minyak, menghindari proliferasi nuklir, memerangi terorisme, mendukung keamanan Israel, dan mendorong demokratisasi (Byman & Moller, 2016).

Definisi mengenai kepentingan AS di Timur Tengah berpusat pada memastikan aliran bebas sumber daya alam dan memelihara hubungan dengan sekutu-sekutu utama serta melindungi mereka dari ancaman eksternal, sebagian untuk menjamin akses bagi operasi militer AS. Kepentingan-kepentingan ini tetap ada, meskipun lingkungan regional, sifat ancaman terhadap kepentingan-kepentingan ini, dan identitas mitra terdekat Amerika di Timur Tengah telah berubah sejak masa strategi “Pilar Kembar” Perang Dingin, ketika Iran dan Arab Saudi menjadi pihak yang paling berpengaruh, benteng melawan pengaruh Soviet dan landasan upaya AS untuk meningkatkan stabilitas regional (Mueller, Wasser, Martini, & Watts, 2017). Meskipun ketergantungan Amerika terhadap minyak bumi dari Timur Tengah berkurang, Amerika Serikat masih berupaya melindungi aliran energi yang tetap penting bagi perekonomian global.

Di antara ancaman-ancaman terhadap mitra-mitranya, konflik intra-negara dan ekstremisme kekerasan telah menutupi sebagian besar risiko konflik antar-negara, dan satu-satunya musuh yang perlu dikhawatirkan oleh Amerika Serikat di kawasan ini—Iran—sering kali beroperasi melalui taktik asimetris. Ketidakstabilan yang ditimbulkan oleh ancaman-ancaman ini juga berdampak besar bagi AS dan sekutu-sekutunya di Eropa. Misalnya, perang saudara yang rumit dan kebangkitan ISIS di Suriah telah menyebabkan arus pengungsi dalam jumlah besar ke Eropa, sehingga memperburuk masalah ekonomi, politik, dan keamanan dalam negeri yang dihadapi sekutu-sekutu penting Eropa. Selain itu, kebangkitan teroris “*lonewolf*” yang terinspirasi oleh ISIS telah meningkatkan ancaman terorisme terhadap wilayah AS dan sekutu AS di seluruh dunia (Mueller, Wasser, Martini, & Watts, 2017). Sejak tahun 1970-an, Amerika mempunyai kepentingan penting dalam mencegah atau memberantas terorisme internasional, yang sebagian besar berasal dari Timur Tengah. Para pembuat kebijakan Amerika sudah sangat peduli dengan upaya menghadapi agresi terhadap negara-negara

sahabat dan mencegah penyebaran senjata pemusnah massal ke negara-negara nakal atau aktor-aktor non-negara (Brands, 2019).

Israel merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang memiliki pengaruh besar di kawasan, terutama di antara negara-negara Arab. Pengaruh Israel di kawasan Timur Tengah hampir setara dengan pengaruh Amerika di kawasan tersebut; Israel bahkan telah menjadi penghubung kepentingan Amerika di kawasan, begitu pula sebaliknya (Ramadhan, 2019).

Sebagai pusat inovasi dan bisnis yang menjadi pendorong utama dibalik pertumbuhan budaya dan ekonomi negara ini, membuat banyak negara lain melakukan kerja sama bahkan menjalin hubungan khusus dengan Amerika Serikat. Seperti yang disampaikan Winston Churchill pada Maret 1946 di Fulton, Missouri ia mempopulerkan istilah “hubungan khusus” untuk mengilustrasikan ikatan antara Amerika-Inggris yang semakin berkembang selama Perang Dunia II dalam pidato terkenalnya mengenai “*Iron Curtain*”. Seiring berjalannya waktu, negara lain kemudian menerapkan gagasan hubungan khusus pada hubungan AS dengan sejumlah negara asing lainnya, termasuk Kanada, Panama, Puerto Riko dan Kepulauan Virgin, Irlandia, Jerman, Liberia, Arab Saudi, Thailand, Filipina, Tiongkok, dan Jepang. Meskipun masing-masing hubungan ini memiliki keberagamannya tersendiri, tidak diragukan lagi hubungan yang paling istimewa adalah hubungan antara Amerika dengan Israel (Bard & Pipes, 1997).

Setelah Perang Dunia II, para pembuat kebijakan Amerika melihat bahwa kepentingan AS diwujudkan dengan menghalangi perluasan pengaruh Soviet, melindungi pasokan minyak, dan mempromosikan hubungan baik dengan sebanyak mungkin negara Arab. Namun, mereka juga merasa terbebani dengan tanggung jawab untuk menjamin kelangsungan hidup Israel, begitu negara itu berdiri. Menyatukan kepentingan-kepentingan, serta menjaganya tetap seimbang seiring dengan perubahan situasi, telah menjadi kepentingan utama kebijakan Amerika terhadap Israel (Spiegel, 1990). AS telah menjalin hubungan khusus dengan Israel tersebut sejak tahun 1948 awal mula terbentuknya negara Israel, Amerika Serikat merupakan negara pertama yang mengakui kedaulatan negara tersebut. Maksud dari “hubungan khusus” ini, bahwa hubungan antara kedua negara selama setengah abad terakhir telah berkembang tidak hanya menjadi hubungan diplomatik dan militer yang lebat, namun juga menjadi

serangkaian ikatan ekonomi, akademis, agama dan pribadi yang unik. Dari perspektif komparatif, Amerika Serikat dan Israel mungkin merupakan ikatan yang paling luar biasa dalam politik internasional (Bard & Pipes, 1997).

Sejak berdirinya Israel pada tahun 1948 hingga pertengahan tahun 1960-an, para pejabat Departemen Luar Negeri dan Pentagon menentang pemberian senjata Amerika kepada Israel karena khawatir bahwa pengiriman senjata Amerika ke Israel akan memprovokasi negara-negara Arab untuk meminta lebih banyak senjata kepada Soviet dan Tiongkok, yang pada gilirannya akan membuat negara-negara Arab meminta lebih banyak senjata kepada Israel, merangsang persaingan senjata di Timur Tengah. Selain itu, seperti yang ditunjukkan oleh Pakta Baghdad (aliansi rezim pro-Barat tahun 1955), mereka berharap dapat mengorganisir seluruh Timur Tengah untuk melawan Uni Soviet. Kebijakan AS mulai berubah pada tahun 1962, ketika pemerintahan Kennedy, atas keberatan Departemen Luar Negeri, menyetujui penjualan rudal anti-pesawat HAWK ke Israel. Penjualan militer selanjutnya sebelum Perang Enam Hari tahun 1967 dimaksudkan untuk menghindari negara mana pun di wilayah tersebut mendapatkan keuntungan militer dibandingkan negara lain (Bard & Pipes, 1997).

Sebagai negara makmur, Israel yang memiliki industri teknologi tinggi yang kuat, terutama pada sektor militer. Dalam beberapa dekade, Israel telah menjadi sekutu militer yang strategis dan sangat dihargai, terutama sejak tahun 1967, ketika Israel memberikan bantuan besar kepada Amerika Serikat dan sekutunya Arab Saudi dengan menghancurkan "virus" Nasserite (pendukung arah politik Gamal Abdul Nasser, salah satu pemimpin revolusi Mesir pada tahun 1952) (U.S. Daily Warns of Threat of 'Nasserite Virus' to Moroccan, Algerian Jews, 1961). Hal tersebut memperkuat hubungan khusus Israel dengan Amerika Serikat, terus berlanjut hingga saat ini. Hasil dari hubungan ini, Israel telah menjadi pusat pengembangan investasi teknologi tinggi AS. Sebenarnya, bisnis teknologi tinggi kedua negara, terutama di bidang militer, saling terkait erat (Chomsky, 2016).

Kebijakan Amerika Serikat berubah secara mendasar setelah perang tahun 1967, kini kebijakan tersebut memberi Israel keunggulan militer kualitatif dibandingkan negara-negara tetangganya. Perjanjian Lyndon Johnson pada tahun 1968 untuk menjual Jet Phantom ke Israel menandai perubahan ini, dan juga menjadikan Amerika Serikat sebagai pemasok senjata utama Israel. Namun, penjualan ini dihasilkan dari

pertimbangan kebutuhan Israel dan pertimbangan politik dalam negeri, bukan dari penilaian kepentingan keamanan AS (Spiegel, 1990).

Amerika Serikat sejak awal yakin bahwa Israel adalah sebuah negara yang tidak aman, sehingga membatasi promosi kepentingan AS di kawasan itu. Gagasan bahwa Israel harus dianggap sebagai aset, terutama sekutu, hampir sepenuhnya asing bagi para pembuat kebijakan awal, dan merupakan pejabat langka, seperti Clark Clifford di bawah Truman dan Omar Bradley di bawah Eisenhower, yang menyatakan bahwa Israel mungkin berguna bagi Amerika Serikat dalam konfliknya dengan Uni Soviet. Dalam satu setengah dekade pertama keberadaan Israel, pandangan bahwa Perang Dingin merupakan penghalang bagi berkembangnya hubungan AS-Israel memiliki kredibilitas yang jauh lebih besar dibandingkan dengan gagasan sebaliknya, yang kini lebih banyak beredar, yaitu bahwa persahabatan itu selalu bergantung pada keberadaan konflik Soviet-Amerika, dan terancam oleh berakhirnya konflik tersebut (Spiegel, 1990).

Hubungan khusus AS-Israel didasarkan pada tiga landasan: kepentingan bersama, kesamaan dalam perkembangan sejarah dan nilai-nilai bersama, dan pengaruh politik Yahudi Amerika. Israel bergantung pada AS dalam hal pasokan perangkat keras militer, dukungan terhadap organisasi internasional yang bermusuhan seperti PBB, dan mediasi dalam konflik Arab-Israel. AS memandang Israel sebagai sekutu yang kuat dan dapat diandalkan di kawasan yang sangat tidak stabil dan bergejolak. Israel berkontribusi terhadap intelijen penting AS, peningkatan persenjataan dan doktrin serta akses militer Amerika. Israel adalah satu-satunya negara demokrasi sejati di Timur Tengah dan salah satu negara paling terbuka di dunia. Ia juga berbagi nilai-nilai budaya, agama, dan sosial AS.

Secara historis, kedua negara berkembang dengan cara yang sama: keduanya merupakan masyarakat imigran dan perintis yang menyerap imigran dari seluruh dunia, mendiami daerah perbatasan dan mengolah lahan subur dan gurun. Yahudi Amerika, komunitas Yahudi terbesar dan terkuat di luar Israel, prihatin terhadap negara Yahudi dan berkomitmen untuk menjamin kesejahteraan dan kelangsungan hidup negara tersebut. Bagi banyak orang Yahudi sekuler Amerika, dukungan terhadap Israel adalah satu-satunya cara mereka dapat mengekspresikan dan mempertahankan afiliasi nasional dan agama mereka (Gilboa, *The Public Dimension of US -Israel Relations*, 2022).

Hubungan khusus umumnya menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Israel memiliki kemitraan yang unik dan tak tertandingi, dengan tingkat persahabatan, kepercayaan, serta kerja sama politik dan militer yang tinggi. Masing-masing pihak menempati posisi khusus dalam kebijakan baik di dalam dan luar negeri pihak lain. Hubungan ini tidak hanya terbatas pada pengambil keputusan namun juga melibatkan kedua masyarakat, sehingga menjamin ketahanannya pada saat konflik. Amerika Serikat terus memberikan dukungan militer, ekonomi, dan politik. Pemerintahan turut bekerja sama dengan Kongres, telah memberikan bantuan yang signifikan kepada Israel sehubungan dengan dukungan domestik AS yang kuat untuk Israel dan keamanannya; tujuan strategis bersama di Timur Tengah; komitmen bersama terhadap nilai-nilai demokrasi; dan ikatan historis yang dihasilkan dari dukungan AS untuk pendirian Israel pada tahun 1948.

Israel mempertimbangkan kepentingan AS dalam merumuskan kebijakan luar negerinya, menuruti permintaan AS, dan bertindak atas nama kepentingan AS. Dari 1948 hingga 1996, Israel menerima langsung dari pemerintah AS lebih dari \$65 miliar bantuan militer dan dukungan ekonomi, menjadikannya penerima bantuan luar negeri AS terbesar. Namun hubungan ini tidak pernah diformalkan melalui pakta pertahanan atau aliansi militer (Bar-Siman-Tov, 1998). Kerja sama keamanan antara Amerika Serikat dengan Israel ini didasarkan pada komitmen untuk mempertahankan “keunggulan militer kualitatif” Israel dibandingkan negara-negara lain di wilayahnya.

Hingga tahun 2023 ini, AS telah memberikan bantuan bilateral dan dana pertahanan rudal kepada Israel sebesar \$150 miliar dolar AS (jumlah saat ini, belum disesuaikan dengan inflasi). Hampir semua bantuan bilateral AS untuk Israel dalam bentuk bantuan militer; namun, Israel menerima bantuan ekonomi yang cukup besar antara tahun 1971 dan 2007. Pada tahun 2016, pemerintah AS dan Israel menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) 10 tahun ketiga tentang bantuan militer, yang berlaku dari tahun fiskal 2019 hingga fiskal 2028. Di bawah ketentuan MOU, Amerika Serikat setuju untuk memberikan bantuan militer sebesar \$38 miliar kepada Israel, tergantung pada persetujuan legislatif (\$33 miliar dalam bentuk hibah Pembiayaan Militer Asing ditambah \$5 miliar dalam bentuk dana pertahanan rudal) (Sharp, U.S. Foreign Aid to Israel, 2023).

Tabel 1 Total Bantuan Luar Negeri AS untuk Israel: 2019-2023

(saat ini, atau yang tidak disesuaikan dengan inflasi, dalam jutaan dolar AS dalam jutaan)

Fiscal Year	Military	Missile Defense	Total
2019	3.300.000	500.000	3.800.000
2020	3.300.000	500.000	3.800.000
2021	3.300.000	500.000	3.800.000
2022	3.300.000	1.500.000	4.800.000
2023	3.300.000	500.000	3.800.000
Total	16.500.000	3.500.000	20.000.000

Sumber: Pinjaman dan Hibah Luar Negeri AS (Greenbook), Departemen Luar Negeri AS, dan Badan Pertahanan Rudal, Pertahanan Rudal dan Statista GDP Amerika Serikat.

Catatan: Angka-angka dalam Greenbook tidak termasuk pendanaan pertahanan rudal yang disediakan oleh Departemen Pertahanan. Menurut Layanan Data USAID pada Januari 2023, dalam dolar AS. konstan 2021 (d disesuaikan dengan inflasi).

Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa bantuan luar negeri yang diberikan Amerika Serikat kepada Israel cukup stabil, namun terjadi peningkatan sebesar \$1 juta dolar AS pada tahun 2022 dalam *missile defense*. Mengacu pada laporan tahunan *U.S. Foreign Aids to Israel* yang dikeluarkan oleh *Congressional Research Service (CRS)*, peningkatan bantuan pertahanan misil kepada Israel dipengaruhi oleh perkembangan ancaman yang dinilai serius oleh AS dan Israel, seperti peningkatan aktivitas militer Iran atau eskalasi ketegangan di wilayah tersebut. Selain itu, peningkatan bantuan mungkin juga terkait dengan komitmen AS untuk mendukung keamanan Israel dalam konteks perubahan politik dan strategis di Timur Tengah, yang dianggap membutuhkan perlindungan yang lebih kuat terhadap ancaman rudal dan serangan dari negara-negara dan kelompok-kelompok militan di kawasan tersebut (Sharp, U.S. Foreign Aid to Israel, 2023)

Sebagai bagian dari kesepakatan 10 tahun senilai 38 miliar dolar AS yang diumumkan oleh mantan Presiden AS Barack Obama pada tahun 2016, pembiayaan militer AS untuk Israel mencapai 3,8 miliar dolar AS pada tahun 2023 (Indonesia, 2023). Israel adalah penerima bantuan luar negeri AS terbesar, dengan total lebih dari \$263 miliar antara tahun 1946 dan 2023 (AJLabs, 2023).

Bantuan militer AS telah membantu mengubah angkatan bersenjata Israel menjadi salah satu militer yang paling berteknologi canggih di. Bantuan militer AS juga telah

membantu Israel membangun industri pertahanan dalam negerinya, yang kini menjadi salah satu eksportir senjata global. Bantuan militer AS untuk Israel telah dirancang untuk mempertahankan "keunggulan militer kualitatif" Israel atas militer negara-negara tetangga, dasar pemikiran untuk kualitatif militer ini adalah Israel harus mengandalkan peralatan dan pelatihan yang lebih baik untuk mengimbangi luas wilayah dan populasi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan sebagian besar musuh-musuh potensialnya.

AS juga mendapat manfaat dari hubungan ini karena dapat memanfaatkan intelijen dan teknologi militer Israel. Khususnya selama Perang Dingin, Israel memberi AS informasi rahasia tentang rencana dan/atau informasi militer Soviet. Israel memberikan akses ke peralatan militer Soviet yang direbut pada tahun 1967 dan 1973 (Mearsheimer & Walt, 2007). Hingga saat ini, intelijen Israel dan Amerika masih bekerja sama dengan erat. Pasukan Pertahanan Israel (IDF), misalnya, telah membantu AS mendeteksi dan menetralkan alat peledak improvisasi (IED) yang merupakan penyebab terbesar dari kekalahan Amerika (Oren, 2011). Selanjutnya hubungan khusus ini mendukung Israel untuk berkompromi dengan negara-negara Arab, hal ini merupakan kepentingan nasional AS untuk memiliki hubungan yang baik dan stabil dengan Arab Saudi sebagai negara pengekspor minyak nomor satu di dunia dan pengekspor minyak bumi kedua ke Amerika Serikat (Administration, 2013).

Bantuan militer AS kepada Israel sering kali menyebabkan peningkatan ketegangan di Timur Tengah. Salah satu dampaknya yaitu bantuan militer ini memungkinkan Israel untuk mempertahankan kekuasaannya atas wilayah yang diperebutkan, yang dapat memperpanjang konflik Israel-Palestina dan meningkatkan penderitaan warga Palestina.

Sesuai penjelasan di atas mengenai hubungan antara Amerika Serikat dan Israel sehingga Amerika Serikat menjadi *pen-supply* utama bantuan militer di Israel yang tentunya mampu memicu ketegangan di wilayah Timur Tengah, sehingga penelitian ini akan berfokus kepada dampak yang ditimbulkan dari bantuan rutin yang dikirimkan Amerika Serikat kepada Israel selama 2019-2023.

Berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan, maka penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah kajian penelitian yang berjudul **Keterkaitan Antara *Military Aids* Amerika Serikat kepada Israel terhadap Dinamika Regional di Timur Tengah.**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian, penulis menarik perumusan masalah guna untuk mempermudah peneliti dalam mengkaji serta menganalisis masalah yang diambil, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: **“Bagaimana dampak yang timbul dari hubungan antara Amerika Serikat dan Israel dengan memberikan bantuan militer kepada Israel terhadap dinamika regional di Timur Tengah?”**

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, penelitian ini akan berfokus pada bantuan militer yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Israel dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Penelitian ini akan melihat apa yang menjadi kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah dengan memberikan bantuan militer kepada Israel, serta konsekuensi dari bantuan tersebut terhadap dinamika regional di Timur Tengah. Dengan demikian, penelitian ini akan mengeksplorasi dan menganalisis konsekuensi dari dinamika bantuan militer Amerika Serikat kepada Israel terhadap stabilitas regional Timur Tengah, serta mempertimbangkan tujuan Amerika Serikat dalam mempertahankan supremasinya di kawasan tersebut.

1.4 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah, penelitian ini ditulis dengan tujuan:

1. Menganalisis hubungan strategis antara Amerika Serikat dan Israel.
2. Mengidentifikasi bentuk dan jenis bantuan militer yang diberikan Amerika Serikat kepada Israel selama periode 2019-2023.
3. Menganalisis dampak bantuan militer Amerika Serikat kepada Israel terhadap perubahan keseimbangan kekuatan regional dinamika keamanan di Timur Tengah.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, kegunaan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya:

1. Kegunaan penelitian secara teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan mengenai implikasi dari hubungan khusus antara Amerika Serikat – Israel dalam upaya mempertahankan dominasi kekuasaan.

2. Kegunaan penelitian secara praktis diantaranya:
 - a) Untuk memenuhi prasyarat kelulusan telah menempuh jenjang studi S-1 dengan pembuatan karya tulis ilmiah pada program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan
 - b) Pembahasan dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk menambah wawasan dalam memahami mengenai dinamika yang terjadi di hubungan internasional, kebijakan luar negeri yang dikeluarkan, serta stabilitas geopolitik di kawasan Timur Tengah.
 - c) Temuan-temuan pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada para civitas akademik untuk mengembangkan strategi yang efektif dan tepat guna untuk memahami dan mengatasi dinamika yang kompleks di Timur Tengah.